

MODERNISASI PERTANIAN, AKSES TERHADAP SUMBER AGRARIA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA: MEMBANGUN RUANG UNTUK NILAI DAN EKSPRESI LOKAL

(Agricultural Modernization, Access To Agrarian Resources, And Family Welfare: Constructing A Space For Local Values & Expressions)

Endriatmo Soetarto^{1,2} dan Laksmi Savitri²

ABSTRACT. *The state program of agricultural modernization in Indonesia had manifested in many forms, and always aimed to uplift the economic status of rural households. However, without recognizing as well as celebrating cultural differences, such modernization will produce a reverse effect: marginalization. In the case of villages in Jambi, where native settlers (orang asli) and migrants (pendatang) dependent on different agrarian resources, and culture constructs their types of livelihood, the state intervention with an assumption of 'one program for all' comes as 'discriminative' aids. Instead of producing welfare, agricultural modernization has resulted in a regressing welfare state of native settlers ('orang asli') community.*

Key words: modernization, family welfare, marginalization.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan keluarga selalu menjadi titik berat dari hampir setiap program pembangunan di negeri ini. Sebagai misal, Soemardjan dan Breazeale (1993) menghitung sedikitnya ada lima puluh program pembangunan yang berbeda-beda telah diluncurkan sepanjang pemerintahan Orde Baru sejak 1969. Beberapa program yang langsung melibatkan masyarakat dan mengimbuahkan kata keluarga di dalam judul programnya dikategorikan oleh Soemardjan & Breazeale (1993) sebagai 'program masyarakat' untuk membedakannya dengan 'program pemerintah'. Program yang terakhir adalah program-program infrastruktur yang seringkali dijalankan tanpa keterlibatan masyarakat. 'Program masyarakat' di antaranya mencakup: keluarga berencana, kesejahteraan keluarga (PKK), koperasi unit desa (KUD), intensifikasi pertanian (Bimas, Inmas) dan pemberantasan buta huruf.

Sudah banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan 'program masyarakat', termasuk yang sudah dilakukan oleh

Soemardjan dan Breazeale. Yang belum banyak diungkap mendalam adalah bagaimana sebuah 'program masyarakat' yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga terbentuk pada kenyataan plural. Salah satu contoh yang cukup komprehensif membahas ini adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan program-program modernisasi pertanian. Hüsken (1998) adalah salah satu di antara banyak peneliti yang mengungkap bahwa program Bimas ternyata tidak sensitif menangkap perbedaan kelas dalam komunitas petani, sehingga terbukti hanya petani kaya yang diuntungkan oleh program ini. Stoler (1977), lalu Sajogyo (1985) melakukan analisis gender dan kelas terhadap fenomena Revolusi Hijau di Jawa menemukan bahwa program modernisasi pertanian tidak mampu menangkap perbedaan gender dan kelas dalam komunitas petani, sehingga berakibat pada marjinalisasi wanita buruh tani.

Gender, kelas dan ras atau etnis, belakangan juga agama, sejak merebaknya 'era reformasi' mendapatkan konteks sosial politik yang memperkuat timbulnya politik identitas. Di lain sisi, ternyata belum banyak terjadi perubahan pada karakter program pemerintah yang lekat dengan asumsi-asumsi homogen dan general. Masyarakat desa terlalu sering diimajinasikan sebagai masyarakat 'satu warna'. Tidaklah heran

¹ Staf pengajar pada Dept. Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Alamat korespondensi: endriatmo@yahoo.com

² Peneliti pada Pusat Kajian Agraria, LPPM IPB.

jika program pemerintah datang dengan pola satu warna saja, tanpa pilihan.

Negasi terhadap pluralisme adalah praktik yang memperlihatkan diskriminasi sebagai gejala dan marjinalisasi sebagai akibat. Tulisan ini akan menyoroti sebuah proses marjinalisasi yang mengeras karena program pemerintah untuk menyejahterakan keluarga pedesaan datang dengan pola 'satu warna' untuk semua. Komunitas dua desa di Jambi yang jauh dari imajinasi 'satu warna' menjadi dasar dari tulisan ini untuk mempertanyakan bagaimana program modernisasi pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga di sebuah komunitas desa justru mwujud menjadi program diskriminatif yang memarjinalkan sebagian orang.

Padahal nilai tambah yang sesungguhnya dimiliki komunitas desa itu sendiri justru melekat pada perbedaan karakter budaya yang diusung oleh masing-masing elemen sosial yang bersangkutan, dan ini sekaligus merupakan suatu aset. Dengan budaya lokal yang masih mampu terus bekerja hingga saat ini, maka hal ini mencerminkan masih berlakunya pula suatu konstruksi (tradisi) sosial tertentu. Artinya, budaya tersebut bisa menciptakan kelenturan sosial dan individual terhadap tekanan yang datang dari luar.

METODE

Penelitian ini dilakukan di dua desa di provinsi Jambi, yaitu Sei Aur dan Sei Rambut, Kecamatan Swakandis, Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berdiri di ranah paradigma interpretatif kritis (Agger 2003). Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian (Yin, 1997). Observasi berpartisipasi, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam, adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan data primer.

Tipe informasi dan data yang dikumpulkan terfokus pada: sistem tenur, struktur agraria termasuk pemetaan sosial terhadap aktor dan lembaga yang terkait kepentingannya pada sumberdaya agraria di lokasi penelitian. Data sekunder diambil dari dokumen dan literatur terkait dengan topik rehabilitasi hutan, partisipasi komunitas, dan informasi spesifik tentang

karakteristik sosial ekonomi desa lokasi penelitian, serta program-program bantuan pihak ke tiga. Tipologi data, sumber dan metode pengambilan data dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengumpulan Data dan Informasi

Kategori data/informasi	Sumber	Metode
Sejarah dan karakter desa	Kepala desa, tokoh formal dan informal, kelompok wanita (PKK)	Wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus
Sejarah migrasi dan pola interaksi sosial	Tokoh pendatang, tetua desa/tokoh adat, generasi ke-2 pendatang	Wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus
Pola nafkah	Kepala desa, tokoh formal dan informal, kelompok wanita (PKK), tokoh pendatang, tetua desa/tokoh adat, generasi ke-2 pendatang	Wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi berpartisipasi
Pola pemilikan dan penguasaan sumber agraria	Kepala desa, tokoh formal dan informal, kelompok wanita (PKK)	Wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus
Konflik sosial berbasis sumber agraria	Kepala desa, tokoh formal dan informal, kelompok wanita (PKK), tokoh adat dan agama	Wawancara mendalam
Program bantuan: asal, karakter, metode, dan implikasi sosialnya	Organisasi pemberi bantuan, kelompok penerima bantuan, kepala desa, tokoh formal dan informal, masyarakat bukan penerima bantuan	Wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus

Pemilihan responden dilakukan dengan cara *snowballing*, yaitu diawali dengan mewawancara informan kunci -seperti: kepala desa, staf

organisasi pemberi bantuan, dan tokoh adat- guna mendapatkan rujukan nama-nama responden yang menguasai informasi dimaksud. Jumlah responden mencakup 36 orang di desa Sei Aur dan 38 orang di desa Sei Rambut. Responden tergolong dalam kelompok penerima bantuan dan bukan penerima bantuan. Afiliasi dua kelompok responden ini dalam kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa, seperti kelompok PKK, pengajian, BPD, LKMD, dan seterusnya, menjadi bahan kajian dalam analisis struktur sosial dan profil kelompok penerima bantuan.

Analisis data kualitatif, secara singkat, termasuk: reduksi data, pemilahan data dalam klasifikasi berdasarkan konsep, dan membuat koneksi antar klasifikasi tersebut (Dey 1993). Catatan harian lapangan yang berisi fakta-fakta terekam dari wawancara dan observasi dilakukan per hari dan diperlakukan sebagai alat pengumpulan data primer dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Sosial Desa Penelitian

Berdasarkan data sekunder yang diambil dari monografi desa Sei Aur dan Sei Rambut tahun 2005 didapatkan profil penduduk sebagai berikut:

Tabel 2. Demografi Desa Penelitian Tahun 2005

Jenis data	Sei Aur	Sei Rambut
Luas desa	12 km ²	4150 ha
Total populasi	2.129 jiwa/ 578 KK	692 jiwa/ 173 KK
Penduduk pria	974 jiwa	378 jiwa
Penduduk wanita	1.155 jiwa	314 jiwa
Etnis Melayu	75%	80%
Pendatang (suku Jawa, Sunda, dan Bugis)	25%	20%

Dari segi mata pencaharian, meskipun ada juga masyarakat yang menjadi pedagang dan pegawai negeri (guru), tetapi pada umumnya adalah petani atau nelayan, seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Sei Aur dan Sei Rambut Tahun 2005

Mata pencaharian	Sei Aur	Sei Rambut
Petani	24%	90,0%
Nelayan sungai	73%	7,0%
Pedagang	2%	2,9%
Pegawai negeri (guru)	1%	0,1%

Adapun tingkat pendidikan penduduk, baik orang asli maupun pendatang di ke dua desa penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan di Dusun Ketapang, Desa Sei Aur dan Desa Sei Rambut Tahun 2005

Pendidikan	Ds. Ketapang- Sei Aur	Sei Rambut
Tamat SLTA	4	4
Tamat SLTP	3	10
Tamat sekolah SD	4	56
Tidak tamat SD/ sederajat	10	70
Masih sekolah SD/ sederajat	8	120
Tidak sekolah		70
Jumlah jiwa	187	692

Dari tiga tabel di atas, tergambar bahwa Sei Rambut memiliki luas kawasan dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan Sei Aur. Perubahan demografi di desa Sei Rambut memang terjadi setelah dimekarkannya dusun Telaga Lima dari desa Sei Rambut tahun 2005.

Kedua desa ini juga menggambarkan profil nafkah yang berbeda, dimana pertanian di Sei Rambut lebih dominan dibandingkan nelayan, tetapi sebaliknya terjadi di Sei Aur.

Dari tingkat pendidikan, terlihat bahwa penduduk Dusun Ketapang yang 90% nya adalah pendatang tidak memiliki tingkat pendidikan lebih baik dari penduduk Sei Rambut yang 80%nya adalah penduduk asli.

Tabel 5. Sejarah Desa Sei Aur dan Rambut

Tahun	Kejadian	
	Sei Aur	Sei Rambut
1893		Buyut Datuk Bakar (nenek moyang orang Sei Rambut) lari dari Jambi, menetap di Teluk Dalam
1895		Digali saluran ke Tanjung Putus untuk transportasi
1924	Mulai dibuka	
1940		Terbentuk pemerintahan dipimpin penghulu
Agresi II Belanda	Penduduk pindah dari Nipah Panjang ke Sei Aur dan terbentuk pemerintahan yang dipimpin Pasira	
1950-1983		Mata pencaharian masyarakat petani ladang berpindah dan nelayan.
1954-1959		Mulai banyak tengkulak masuk desa
1960	Berada di bawah Kecamatan Kumpeh	
1965	Ditetapkan sebagai desa mandiri, masuk kecamatan Swakandis	Mulai ramai pendatang
1970		Pemerintahan pindah ke teluk harimau
1980	Dibuka dusun (baru) Ketapang	
1983		Ditetapkan menjadi desa secara administratif
1983		Ladang berpindah berhenti dengan mulai masuknya pupuk ke desa
1994	Mulai ramai pendatang	

Sejarah Desa Penelitian

Diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam beberapa tokoh desa menghasilkan informasi sejarah desa seperti disajikan pada Tabel 5.

Data sejarah desa menunjukkan bahwa Sei Rambut mengalami sejarah pembentukan desa yang lebih panjang dibandingkan Sei Aur. Masuknya pendatang di Sei Aur jauh lebih akhir dibandingkan proses mulai menetapnya pendatang di Sei Rambut. Akan tetapi, dari segi jumlah, ternyata penduduk pendatang 5% lebih banyak menetap di Sei Aur dibandingkan dengan Sei Rambut.

Interpretasi tentang struktur sosial dan struktur kepemilikan lahan berdasarkan sejarah penguasaan lahan akan ditampilkan sebagai bahan analisis pada bagian pembahasan. Demikian pula dengan analisis keterkaitan antara data program bantuan, etnisitas dan pola nafkah, akan ditampilkan dan langsung dibahas lebih mendalam pada bagian pembahasan.

Orang Asli dan Pendatang: Struktur Sosial Komunitas Sei Rambut dan Sei Aur

Sejarah dan Latar Belakang Budaya: Desa Genealogis ke Desa Campuran

Desa Sungai (Sei) Aur terdapat di Kecamatan Swakandis, Kabupaten Muaro Jambi, sekitar 10 km dari Desa Sungai (Sei) Rambut. Kedua desa tersebut dapat dijangkau melalui sungai dan transportasi darat, sekitar 4 jam dari Jambi. Secara fisik, kedua desa memiliki banyak kesamaan, salah satunya adalah keduanya berada di sepanjang Sungai Batanghari dan masing-masing berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Berbak. Sei Rambut berbatasan langsung dengan sisi Barat Taman Nasional Berbak.

Dari empat kelompok etnis (Melayu, Jawa, Sunda dan Bugis) yang tinggal di kedua desa itu, masyarakat menggolongkan diri hanya menjadi dua kelompok besar, yaitu: (1) 'orang asli' yang identik dengan orang Melayu, meskipun mereka bukan keturunan orang Sei Aur ataupun Rambut, tapi orang Melayu dari kota Jambi, dan (2)

'pendatang' yang berarti 'bukan orang Melayu', walaupun mereka datang sudah sejak 40 tahun lalu. Identitas etnis menjadi instrumen pembeda. Bagaimana perbedaan etnis ini menjadi pembeda tingkat kesejahteraan?

Sejarah terbentuknya desa memegang peranan penting untuk memahami proses-proses intervensi negara yang melahirkan berbagai bentuk pembedaan. Pada awalnya kedua desa ini adalah desa-desa genealogis, yaitu desa yang terbentuk dari masyarakat-hukum yang berasal dari satu keturunan (Kartohadikoesoemo, 1953). Pada tahun 1924, nenek moyang dari penduduk Desa Sei Aur pindah dari wilayah yang dinamai Teluk Ketapang ke desa Sungai Aur sekarang ini. Mereka pindah karena Teluk Ketapang sebagian dihuni oleh suku Kubu yang pada saat itu masih memiliki tradisi kanibal. Karena perasaan tidak aman, sebagian penduduk yang bukan suku Kubu menyingkir 40 km ke arah Selatan dan menetap di pinggir Sei Aur. Nama Sei Aur diambil dari nama bambu aur yang tumbuh di sepanjang sungai ini. Pada saat itu komunitas ini dipimpin oleh marga Jebus, dengan seorang pemimpin yang disebut *Pasira*, hingga tahun 1960 ditempatkan di bawah Kecamatan Kumpeh. Kemudian, pada tahun 1965, Sei Aur menjadi desa mandiri yang secara administratif berada di bawah Kecamatan Swakandis.

Sei Rambut memiliki sejarah yang berbeda. Penduduknya berasal dari hulubalang kerajaan Melayu Jambi yang melarikan diri setelah Raja Kayu Itam meninggal tahun 1893. Lalu mereka menemukan wilayah untuk dihuni yang mereka namai Sei Rambut. Nama Sei Rambut diambil dari banyaknya ditemukan rambut manusia di sungai. Menurut cerita, rambut tersebut berasal dari manusia yang dimangsa buaya di Sungai Batanghari, lalu dibawa menghilir untuk dimakan. Oleh karena itu, orang menamai bagian sungai ini sebagai Sei Rambut, yang kemudian diambil menjadi nama desa. Pola kepemimpinan sampai dengan tahun 1983, ketika Sei Rambut ditetapkan menjadi desa secara administratif, masih berupa kepemimpinan tradisional yang disebut penghulu. Seorang penghulu ditunjuk oleh marga, dan penghulu menunjuk seorang mangku sebagai wakilnya. Bersamaan dengan penetapan status desa administratif, pola ini pun menghilang.

Sebagai desa-desa genealogis, Sei Rambut dan Aur terdiri dari masyarakat yang homogen dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Ketika terjadi penyeragaman bentuk pemerintahan desa melalui UU No.5/1979 tentang pemerintahan daerah, desa-desa genealogis ini menjadi desa yang dibentuk oleh negara, yaitu ditandai dengan hilangnya sistem kepemimpinan tradisional dan masuknya pendatang karena program transmigrasi. Namun demikian, hilangnya tata pemerintahan tradisional tidak berarti hilangnya kuasa masyarakat genealogis terhadap teritorinya. Sebaliknya, ikatan darah dan bumi semakin menguat karena masuknya pendatang.

Pada praktiknya kedua desa ini mewujudkan menjadi desa campuran, yaitu daerah hukum teritorial dimana masyarakat seketurunan memegang kekuasaan (Kartohadikoesoemo 1953). Kepala Desa di kedua desa, tidak pernah berasal dari komunitas pendatang. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk membagi tanah bagi pendatang, memberikan sanksi adat bagi pelanggaran-pelanggaran sosial, termasuk yang dilakukan oleh pendatang. Secara politis, klaim keaslian menjadi bagian dari politik identitas untuk melakukan kontrol sosial, menguasai sumber-sumber agraria dan dapat dimaknai pula sebagai ekspresi dari resistensi terhadap dampak campur-tangan negara. Akan tetapi, apakah memiliki kuasa untuk mengklaim kepemilikan sumber-sumber agraria dapat secara otomatis mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk asli etnis Melayu? Siapa sebetulnya yang disebut penduduk asli dan pendatang, dan bagaimana intervensi negara pada akhirnya menentukan pemilik kesejahteraan?

Orang Asli

'Orang asli' yang tinggal di Desa Sei Aur dan Sei Rambut memiliki budaya ekologis yang mudah dibedakan dengan pendatang. Dari seluruh angka komunitas asli (orang Melayu) yang tinggal di Sei Aur dan Sei Rambut, sebanyak 95% membangun rumah di sepanjang Sungai Batanghari dan hidup sebagai nelayan. Jarak antara rumah dan sungai yang sangat dekat memungkinkan mereka untuk mengakses sumber-sumber perairan, seperti ikan dan jenis tangkapan lain (udang, kepiting, dan lain-lain).

Hasil tangkapan dari sungai sebagian dikonsumsi, dan sebagian besar dijual. Mereka menjualnya kepada pembeli setempat (tengkulak) dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian, para tengkulak menjualnya ke Jambi. Sejak tahun 1999 volume penangkapan mengalami penurunan karena peningkatan aktivitas transportasi sungai dan jumlah nelayan.

Di samping menangkap ikan, sumber nafkah orang asli adalah hasil kayu dan rotan. Aktivitas ini telah dilakukan sejak masa pendahulu-pendahulu mereka. Secara berkelompok orang asli dengan menggunakan perahu kecil biasanya memasuki hutan yang ada di dalam Taman Nasional Berbak. Mereka mengikuti alur Sungai Batanghari sekitar 30 km ke arah Tenggara. Seorang 'toke' biasanya akan meminjamkan sejumlah uang pada mereka untuk kepentingan keluarga sehari-hari ketika mereka berada di hutan, juga untuk membeli perbekalan selama di hutan. Kesepakatan ini mengikat para pembalok untuk menjual kayu yang dihasilkan kepada toke yang memberi mereka pinjaman uang. Mereka kemudian melarung kayu melalui Sungai Batanghari dimana toke akan mengumpulkan dan membayarnya dengan harga yang sangat rendah. Hasil penjualan bahkan terkadang tidak cukup untuk membayar hutang mereka kepada toke. Sistem pembayaran di muka ini menyebabkan mereka harus tetap masuk hutan sekedar untuk mempertahankan hidup. Seluruh komponen lingkaran pemanenan dan penjualan kayu dan rotan dikuasai oleh orang Melayu, mulai dari pembalok sampai dengan toke. Tidak ada satu orang pun pendatang bisa masuk di dalamnya.

Memasuki era reformasi, pembalokan kayu semakin gencar karena pemaknaan reformasi sebagai era kebebasan untuk mengklaim sumberdaya lokal, termasuk kayu. Namun memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang menggalakkan pemberantasan 'illegal logging', menurut penduduk, penebangan kayu menurun sampai tinggal 5%. Kondisi ini menyebabkan banyak orang asli kehilangan nafkah.

Pada awalnya, di Sei Rambut, orang asli melakukan pertanian ladang berpindah. Kegiatan ini berhenti sekitar tahun 1980-an, ketika pendatang dari Jawa mulai masuk di desa. Praktik ladang berpindah tidak bisa dilakukan lagi, sebab

rotasi lahan tidak mungkin dilaksanakan di areal yang sudah terfragmentasi untuk lahan pendatang. Selain itu, masuknya pendatang dari Jawa membawa pula teknik pertanian menetap yang mengandalkan input modern, seperti pupuk kimia. Dengan adanya pupuk, orang asli mulai menerapkan juga pertanian padi sawah secara permanen dan menggantungkan kesuburan tanah pada pupuk kimia, bukan lagi pada pemulihan kesuburan melalui pola rotasi.

Namun, dengan semakin besarnya arus pendatang yang membutuhkan tanah, akhirnya tanah menjadi aset likuid bagi orang asli. Bagi mereka tanah harus mudah dilepas untuk dijual, sehingga tidak ada gunanya ditanami. Akhirnya mereka berkonsentrasi hanya ke pola nafkah yang tidak berbasiskan lahan, seperti nelayan dan pemanenan hasil hutan (kayu dan rotan). Kedua jenis sumber nafkah ini semakin mengalami tekanan, karena keterbatasan stok di alam yang tidak mampu menandingi tingkat pemanenan.

Pendatang

Pendatang tiba di Sei Aur sekitar tahun 1994. Sebagian besar mereka adalah etnis Sunda yang berasal dari Kuningan, Sumedang, Majalengka, Tasik, Ciamis dan Bogor. Mereka adalah pecahan keluarga transmigran dari desa Rantau Raso dan Pelita. Kini mereka tinggal berkelompok di Dusun Ketapang, sehingga 95% penduduk dusun ini adalah orang Sunda.

Di Sei Rambut, orang Bugis sudah masuk sejak tahun 1964. Mereka datang untuk mendapatkan lahan pertanian yang subur. Arus migrasi berikutnya adalah kedatangan orang Jawa secara berangsur dan berkelompok pada tahun 1976 dan 1980-an. Mereka juga merupakan pecahan keluarga transmigran yang mencari lahan baru untuk diolah.

Kaum migran ini beradaptasi pada kehidupan barunya dengan berkonsentrasi pada pekerjaan pertanian, terutama padi sawah, sayuran dan palawija. Mereka menerapkan teknik-teknik pertanian modern yang sudah dibawa dari daerah asal mereka di Jawa. Penggunaan pupuk, pestisida dan bibit unggul (IR 42) sudah menjadi kebiasaan petani pendatang. Ketergantungan terhadap input pertanian ini mendatangkan tengkulak yang menjerat petani dengan pinjaman pupuk. Pinjaman dibayar dengan hasil pertanian, sehingga kebanyakan petani selalu menerima

harga di bawah harga pasar. Di pihak lain, produktivitas yang tinggi ditunjukkan oleh petani pendatang melalui prestasi Desa Sei Aur dan Rambut sebagai salah satu penghasil utama beras dan kacang bagi kota Jambi. Kerja keras ini membawa mereka pada kehidupan ekonomi yang lebih baik dibanding orang asli. Pemilik mobil dan perahu motor (pompong) adalah petani pendatang, sementara orang asli yang terbilang berada adalah Kepala Desa.

Salah satu tradisi pertanian modern adalah pembentukan kelompok. Membentuk kelompok tani juga menjadi ritual petani pendatang di Sei Aur dan Rambut. Mereka mengaku terbiasa membentuk kelompok untuk menjalin kebersamaan, saling bantu, menumbuhkan kebiasaan berdiskusi dan tukar informasi. Kelompok yang terbentuk pertama, yaitu: Berkat Usaha, lalu diikuti oleh terbentuknya kelompok-kelompok lain di Dusun Ketapang-Desa Sei Aur, seperti Rukun Damai (2002), Karya Budi (1999), Koto Jaya (1999). Menurut ibu-ibu PKK di Sei Aur, kelompok-kelompok tani orang asli tumbuh setelah melihat kelompok tani yang dibentuk oleh kaum pendatang dari Jawa. Kaum ibu bahkan mengatakan bahwa orang asli banyak belajar tentang pertanian dari kaum pendatang.

Struktur Sosial: Status Sosial, Posisi dan Aktor

Di Sei Aur dan Sei Rambut, berdasarkan status aktor, peran dan posisinya, terdapat perbedaan stratifikasi sosial antara komunitas orang asli dan pendatang, terutama untuk mereka

yang menempati strata sosial paling tinggi. Perbandingan stratifikasi sosial antara dua komunitas ini ditunjukkan oleh Tabel 7.

Pada komunitas orang asli, kelompok yang disegani didasarkan pada posisi kepemimpinan (ketokohan) dan kekuasaan atas komunitas. Berbeda dengan komunitas pendatang yang mempunyai pandangan bahwa status sosial seseorang dilihat dari kondisi ekonominya, maka bagi pendatang, seseorang bisa menjadi kaya jika ia menjadi orang pertama yang membuka lahan, karena mereka mampu mengakumulasi lahan sejalan dengan waktu.

Masing-masing komunitas memiliki 'tokoh'nya sendiri-sendiri. Misalnya, seorang tokoh agama di komunitas orang asli disegani dan dipanuti oleh komunitasnya, sementara komunitas pendatang punya tokoh agama lain yang juga pendatang dan mereka segani serta taati. Pengecualian hanya pada tokoh Kepala Desa dan tetua petani pendatang saja, tentunya terkait pada peran dan kekuasaan mereka yang lintas komunitas. Kepala Desa karena kekuasaannya memberikan ijin kepemilikan tanah bagi pendatang, serta menerapkan sanksi adat, sedangkan tetua petani pendatang karena kondisi ekonominya paling mapan, serta kepiawaian dalam bertani yang menjadikan mereka tempat bertanya bagi orang asli yang ingin belajar bertani.

Posisi status sosial dan klaim keaslian mempengaruhi pula strata kepemilikan lahan di dua desa penelitian, seperti terlihat di Tabel 8.

Tabel 7. Stratifikasi Sosial Komunitas 'Orang Asli' dan 'Pendatang'

Stratifikasi sosial	Komunitas orang asli	Komunitas pendatang
Tinggi	Kepala Desa, Toke, Kepala Dusun, orang pintar, tokoh agama, ketua kelompok tani (pendatang)	Petani kaya, Kepala Desa (orang lokal), orang pintar, Kepala Dusun, dan tokoh agama
Menengah	pemilik toko, guru	pemilik penggilingan, pemilik waserba/toko, guru
Rendah	pencari kayu (pembalok)	petani penggarap

Tabel 8 . Stratifikasi berdasarkan Kepemilikan Lahan

Stratifikasi Sosial		Land holding
Golongan atas	atas	Memiliki lahan lebih dari 20 ha: Kepala desa, karena ia memiliki akses terbesar untuk mengklaim lahan, sehingga ia mampu memiliki lahan yang berlokasi strategis dan berkualitas subur.
	menengah	Memiliki lahan antara 18-20 ha: Pembuka lahan pertama pada tahun 1960an (pendatang).
Golongan menengah	atas	Memiliki lahan lebih dari atau sampai dengan 10 ha: kepala dusun, tokoh agama, <i>dukun</i> , tokoh adapt atau <i>penghulu adat</i> (' <i>orang asli</i> ')
	Menengah	Memiliki lahan lebih dari atau sampai dengan 5 ha: pembalok yang mempunyai kapal motor (orang asli), petani sukses (pendatang)
	Bawah	Memiliki lahan antara 4-5 ha: petani (pendatang)
Golongan bawah		Memiliki lahan 2 ha atau kurang: petani kecil (pendatang)

Peta Teritorial Orang Asli dan Pendatang

Selain secara struktur orang asli dan pendatang menunjukkan keterpisahan dan sedikit sekali memiliki persinggungan, secara teritori pun terjadi segregasi wilayah. Ketergantungan rumah tangga orang asli pada ekosistem sungai menghasilkan keputusan untuk menetap tidak jauh dari sungai. Pola pemukiman yang bersifat utilitarian terhadap sungai ini mendorong timbulnya penguasaan lahan berdasarkan kekerabatan di sepanjang tepi sungai. Keluarga yang lebih dulu menguasai dan memiliki tanah pinggir sungai berpeluang lebih besar untuk menguasai areal ini bagi kepentingan pemukiman generasi keturunan mereka. Kondisi seperti ini mendorong semakin tertutupnya lingkungan pinggir sungai untuk pendatang baru. Pola pemukiman mereka membentuk kelompok besar (*cluster*) wilayah orang asli.

Kondisi sebaliknya berlaku pada komunitas pendatang. Oleh karena mereka memiliki pola nafkah yang tidak tergantung pada sungai, mereka membangun rumah di tanah pertaniannya supaya mudah menjaga tanaman mereka dari gangguan hama. Lahan pertanian mereka berlokasi 1 km menjorok ke darat dari Sungai Batanghari dan tidak pernah lebih dekat dari itu. Pilihan tersebut terkait dengan upaya menghindari banjir yang berpeluang menghancurkan tanaman mereka. Mereka sengaja menjauhi daerah pinggir sungai karena selain padi sawah, mereka juga menanam tanaman lahan kering. Karena tinggal di tanah pertanian,

kelompok pemukiman mereka cenderung terpencar-pencar sesuai dengan letak tanahnya dan membentuk kelompok besar wilayah pendatang yang bisa mencakup satu dusun.

Satu Desa Dua Komunitas

Komunitas orang asli dan pendatang terpisah secara sosial dan teritorial. Karena situasi tersebut, di antara mereka tidak ada konflik dalam hal perebutan sumberdaya, tetapi mereka juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan asimilasi. Kondisi tersebut merupakan basis bagi terbentuknya segregasi internal pada komunitas yang sama-sama menempati satu desa administratif.

Orang asli dan pendatang terpisah secara teritorial karena pola nafkah yang berbeda. Nafkah orang asli berorientasi ke sungai dan hutan, sementara pendatang terpusat pada lahan pertanian. Keberhasilan pendatang di bidang pertanian tidak otomatis memikat orang asli untuk beradaptasi pada kegiatan pertanian menetap. Sebanyak ±15% orang asli beralih pola nafkah ke pertanian. Mereka ini pun biasanya adalah orang tua, karena yang muda lebih suka memanen kayu dan ikan, atau pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.

Keterpisahan sosial terjadi karena masing-masing komunitas orang asli maupun pendatang membangun infrastruktur sosialnya sendiri-sendiri. Masing-masing mereka punya tokoh agama sendiri, jika sakit mereka punya dukun dan orang pintar sendiri, juga punya pemimpin sendiri

yang berasal dari komunitasnya masing-masing. Bahkan kawin-mawin antara orang asli dan pendatang tidak pernah terjadi. Orang asli khawatir jika mereka menikahi wanita pendatang, sang wanita tidak akan mau menetap selamanya dan akhirnya akan tetap ikut keluarga asalnya. Sementara pendatang pun enggan menikahi wanita penduduk asli, karena mereka tidak terbiasa bekerja di sawah dan ladang. Akhirnya, inilah wajah Sei Aur dan Rambut, satu desa dengan dua komunitas yang jauh dari imajinasi 'satu warna'.

Marjinalisasi Orang Asli: Kegagalan Program Kesejahteraan 'Satu Warna'

Program Bantuan 'Diskriminatif'

Sei Aur maupun Sei Rambut bukan desa yang ditunjuk pemerintah sebagai lokasi transmigrasi. Pendatang yang masuk ke Sei Aur tahun 1994 tidak datang karena ditransmigrasikan. Mereka adalah generasi ke-2 dan ke-3 dari para transmigran yang ditempatkan di desa-desa tetangga Sei Aur yang perlu mencari lahan karena sudah tidak kebagian lahan lagi di desa di mana ayah-ibu atau kakek-nenek mereka ditransmigrasikan dari Jawa. Begitu pula halnya dengan Sei Rambut.

Program modernisasi pertanian dalam bentuk Bimas, Inmas, Supra Insus dan sejenisnya pun, sepanjang ingatan masyarakat, tidak pernah masuk secara khusus dibawa oleh penyuluh

pertanian. Kedatangan penyuluh pertanian bahkan sangat jarang. Pertanian modern yang hadir dalam bentuk penggunaan pupuk, pestisida, bibit unggul berikut mekanisasinya, dikenal di Sei Aur dan Rambut karena dibawa oleh pendatang dari Jawa.

Program intervensi pemerintah justeru mulai semakin intensif ketika pertanian telah sukses dikembangkan oleh kaum pendatang. Hampir semua bantuan yang diberikan pemerintah atau lembaga non-pemerintah berfokus pada kegiatan pertanian. Dengan sendirinya komunitas pendatanglah yang menjadi penerima manfaat, sebagaimana terlihat di bawah ini.

Bantuan mekanisasi pertanian, seperti penggilingan padi, perontok dan traktor diberikan oleh pemerintah di dusun Ketapang, sebuah dusun di Sei Aur yang 95% penduduknya adalah pendatang yang berprofesi petani. Menurut orang asli Sei Aur, "*Di dusun Ketapang, pendatang memiliki KUD yang menjalankan usaha simpan pinjam. Pada masyarakat lokal (baca: orang asli) KUD tidak dapat mengalirkan dana, sebab Datuk (sebutan bagi Kepala Desa) yang kurang bisa mengatur, dana hanya dipinjamkan pada orang-orang tertentu*". Akibatnya, di mata orang asli KUD adalah untuk elit desa dan mereka yang bekerja di bidang pertanian. Oleh karena itu, satu-satunya sandaran untuk mencari pinjaman modal bagi orang asli adalah tengkulak atau toke.

Tabel 9. Program Bantuan

Jenis bantuan	Desa Sei Aur (1)	Desa Sei Rambut (2)	Pemberi bantuan (lembaga/tahun)
Pertanian	Bibit padi, kemiri, melinjo, dukuh, sukun	Bibit padi IR 64: 40 kg/KK	(1) Pem.provinsi / 2003 (2) Dinas Pertanian
	Kacang hijau : 5 kg	Bibit karet, upah buka lahan, biaya pengelolaan: 6 KK	(1) Pemerintah (2)Program Padat Karya
	Coklat, jeruk, tanaman keras lainnya	Ternak sapi: 4 ekor Coklat, jeruk, tanaman keras lainnya	(1) LSM PS / 2003 (2)Taman Nasional Berbak / 2003 dan LSM PS / 2003
	Penggilingan padi : 1 buah	3 sak/ha pupuk, 1 sprayer 3 orang, 5 botol/ha pestisida	(1) Pokja Gubernur Jambi (2) USDP / 2001
	Huller, perontok dan traktor	Bibit pinang, lamtoro, sengon	(1)Gubernur Jambi / 2005 (2)JICA / 1997-2001
Non-pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Modernisasi Pertanian dan Marjinalisasi

Migran dan pertanian modern masuk ke Sei Aur dan Rambut tidak berwajah 'intervensi pemerintah' tetapi seakan merupakan proses natural dari perkembangan penduduk. Namun, tidak demikian adanya jika dirunut dari terjadinya proses migrasi dan perubahan pola pertanian. Peran program transmigrasi dan intensifikasi pertanian yang diluncurkan pemerintah sepanjang Orde Baru tidak dapat diabaikan.

Modernisasi pertanian di Indonesia datang ke desa-desa di Jawa sejak tahun 1965, dikemas dalam program Bimas. Dari program inilah petani Jawa diperkenalkan dengan penggunaan pupuk, pestisida, bibit unggul, irigasi teknis, koperasi unit desa (KUD), kredit bank, dan pembentukan kelompok. Seluruh elemen ini telah terinternalisasi dalam cara-cara bertani, terutama petani Jawa, sepanjang hampir 20 tahun. Bahkan secara keseluruhan dalam pertanian Indonesia telah terjadi pergantian struktur ke arah produksi padi basah sejak pertengahan tahun 1960-an (Bechtold, 1988). Tujuannya sederhana saja, yaitu untuk peningkatan produksi demi swasembada pangan dan kesejahteraan bagi petani.

Scott (1998) menyebut modernisasi pertanian dengan istilah *high-modernist agriculture* (pertanian modern tingkat tinggi) dan menunjuk kegiatan ini sebagai upaya-upaya penyederhanaan dan peniadaan pola-pola pertanian lokal yang sesungguhnya menghargai keberagaman dan kekhasan setiap lokalitas. *High-modernist agriculture* tidak mampu mengenali bahwa setiap jenis tanaman dan pola pertaniannya lekat dengan seperangkat relasi-relasi sosial. Singkatnya, menurut Scott, modernisasi pertanian telah menutup mata dari praktik-praktik pertanian lokal, sehingga sistem pertanian modern berdiri sebagai koreksi atas seluruh praktik pertanian yang tidak mengikuti kaidahnya.

Petani Jawa adalah representasi dari keberhasilan negara untuk menanamkan modernisasi cara-cara bertani. Modernisasi sebagai usaha untuk merangsang produksi, dipandang Bechtold (1988) hanya mampu memperbaiki situasi sawah irigasi di Jawa, jadi yang memperoleh keuntungan adalah petani yang kondisinya sudah baik, tapi tidak petani di luar Jawa. Ketika orang Jawa datang ke Sei Aur dan Rambut dengan membawa praktik-praktik pertanian tersebut, mereka merepresentasikan

suatu cara bertani yang berhasil, dikehendaki, direstui dan diberi label modern oleh negara. Pola pertanian modern ini bahkan menyingkirkan pertanian ladang berpindah yang biasa dipraktikkan orang asli tanpa resistensi, tetapi juga tanpa ada adaptasi.

Pola ladang berpindah tersingkir karena lahan untuk rotasi telah dibagi kepada pendatang. Mereka terpaksa memakai terus-menerus sebidang lahan hingga harus tunduk pada penggunaan pupuk demi kesuburan. Lalu akhirnya menyerah, berhenti bertani, karena cara bertani mereka 'hanya ala orang desa' (baca: tidak modern). Ibu-ibu pendatang di Sei Aur berkata bahwa : "*Orang asli belajar bidang pertanian dari pendatang. Mereka mengaku kalah sebab menurutnya, mereka orang desa. Di sini ada pertanian, tapi agak kurang, karena mereka cepat putus asa*". Pernyataan ini mengekspresikan adanya inferioritas, rasa menyerah dan apatisisme orang asli terhadap pendatang.

Dalam kasus bantuan pemerintah dan lembaga lainnya, bantuan yang difokuskan pada kegiatan pertanian semata telah secara otomatis semakin melegitimasi kegiatan pertanian sebagai pola nafkah 'yang direstui'. Sebaliknya, mata pencaharian orang asli sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan tidak pernah menarik perhatian dan bantuan dari lembaga mana pun. Bahkan mencari kayu di hutan mendapat tekanan dari pemerintah, karena dianggap 'ilegal'. Sementara itu, sebagai nelayan, orang asli mengalami penurunan hasil tangkapan karena tingkat kompetisi yang semakin tinggi, sementara potensi ikan terbatas. Singkatnya, status kesejahteraan orang asli cenderung semakin menurun, tetapi pada saat yang sama mereka semakin teralienasi dari bantuan luar.

Sebagai pihak yang hanya menjadi penonton dari datangnya berbagai bantuan pihak luar, orang asli mengalami transformasi menjadi komunitas yang apatis, bahkan cenderung anarkis. Kondisi marjinal yang dialami orang asli telah menempatkan mereka dalam posisi labil dalam mengadaptasi perubahan. Pertanian modern tidak diadaptasi sebagai jalan keluar menuju kesejahteraan yang lebih baik, karena orang asli selalu dalam posisi belajar dan pendatang berada pada posisi ahli. Dengan sendirinya, mereka tidak memiliki kapasitas untuk berkompetisi baik

dalam hal kuantitas maupun kualitas produksi. Posisi 'kalah', padahal tuan rumah penguasa tanah, tentunya bukan pilihan yang menggiurkan bagi orang asli. Sebab itulah, mereka memilih untuk menjadi 'penjual tanah' dimana sumber kekuasaan, kepercayaan diri, dan kebanggaan identitas masih bisa digali. Meskipun pilihan ini pada akhirnya tidak pernah membawa orang asli pada posisi 'pemenang'. Modernisasi pertanian, sebagai program peningkatan kesejahteraan (produksi dan profit) telah gagal merangkul orang asli dalam satu biduk kesejahteraan dengan penduduk pendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis realitas 'program bantuan pemerintah' pada kasus komunitas Sei Aur dan Rambut di Jambi, beberapa kesimpulan dapat ditarik, yaitu:

1. Program pemerintah yang telah dijalankan puluhan tahun dan terinternalisasi di masyarakat dengan baik mampu melahirkan agen-agen program. Pengetahuan dan praktik dari agen ini dimaknai sebagai praktik dan pengetahuan yang memiliki legitimasi pemerintah. Tanpa adanya kepekaan terhadap kekhasan dan keberagaman di setiap lokalitas, praktik dan pengetahuan agen program mewujudkan sebagai satu-satunya 'warna' dari sebuah komunitas desa.
2. Meskipun modernisasi pertanian terlihat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga, tapi pertanian modern tidak hanya merupakan strategi produksi, ia juga merupakan strategi kontrol dan penyelarasan (*appropriation*). Ladang berpindah menyebabkan penduduk selalu bergerak, sulit dideteksi keberadaannya, tapi dengan modernisasi pertanian, penduduk ditundukkan pada pola-pola pertanian menetap yang memudahkan kontrol. Selain itu, dengan penerapan satu pola pertanian saja keseluruhan program dapat lebih sederhana dan mudah diselaraskan.
3. Dengan demikian program modernisasi pertanian tidak didisain untuk peka terhadap perbedaan, kekhasan, keberagaman. Ia

dirancang agar setiap perbedaan mengadaptasi diri untuk menjadi sama dan selaras. Ketika adaptasi tersebut tidak terjadi, maka kelompok yang tidak mau atau mampu beradaptasi terpendal di ruang marjinal dan berujung pada timpangnya kesejahteraan.

4. Pelajaran paling penting tentang menyediakan ruang untuk nilai dan ekspresi lokal, termasuk dalam konteks meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah: pluralitas bukan hanya bahasa tentang perbedaan, tetapi juga tentang keterikatan, keterlibatan, dan partisipasi.

Saran

1. Sistem 'pukul rata' atau 'satu program untuk semua' terbukti tidak mampu mengentaskan persoalan kemiskinan di semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, program modernisasi pertanian demi peningkatan kesejahteraan selainya tidak dirancang sebagai cetak biru yang dipaksakan untuk semua tipe komunitas, tanpa mengenali pola nafkah aslinya.
2. Dalam meluncurkan program kesejahteraan, pemerintah perlu memaknai pluralitas bukan sebagai bahasa tentang perbedaan semata, tetapi lebih penting lagi adalah tentang keterikatan, keterlibatan, dan partisipasi kolektif.
3. Program kesejahteraan keluarga seyogyanya adalah jembatan untuk bisa berjalan bersama, saling bertukar dan berdialog di antara sesama warga bangsa dan negara. Semangat kesejajaran perlu diwujudkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih partisipatif dan mencakup keseluruhan elemen warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, B. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya* (Critical Theory: Critiques, Application, and Its Implication). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bechtold, HW. Karl. 1988. *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Dey, I. 1993. *Qualitative Data Analysis*. Routledge. London
- Husken, F. 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensias Sosial di Jawa 1830-1980*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Kartohadikoesoemo, S. 1953. *Desa*. Penerbitan Sumur Bandung. Bandung
- Sajogjo, P. 1985. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Radjawali. Jakarta.
- Scott, J.C. 1998. *Seeing Like A State*. Yale University Press. New haven and London
- Soemardjan, S. & K. Breazeale. 1993. *Cultural Change in Rural Indonesia: Impact of Village Development*. Sebelas Maret University Press. Sebelas Maret University Press. Solo.
- Stoler, A. 1977. *Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa*. Masyarakat Indonesia, IV-1.
- Yin, R.K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo. Jakarta